

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang dimaksud dalam rencana keuangan dalam APBD ini meliputi seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.

a. Tujuan dan Fungsi APBD

Pada dasarnya tujuan dan fungsi dari APBD sama dengan tujuan dan fungsi APBN, hanya saja ruang lingkungannya yang berbeda. Fungsi APBD terbagi atas :

1. Fungsi Otoritas

APBD merupakan dasar untuk pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi Perencanaan

APBD sebagai pedoman untuk pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan dan program pada suatu daerah di tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

APBD sebagai pedoman untuk menilai dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintah daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Fungsi Alokasi

APBD sebagai pembagian yang diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

ABPD sebagai pendistribusian yang bertujuan untuk memperhatikan keadilan dan kepatutan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat dua bagian penting yaitu anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber

dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan kegiatan dan program dalam otonomi daerah.

PAD suatu daerah merupakan gambaran kemakmuran (wealth) dari pemerintah daerah atau provinsi tersebut. Peningkatan jumlah PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. (Adi, 2006). Kualitas layanan publik yang baik merupakan cerminan kinerja suatu pemerintah daerah yang baik pula dan peningkatan nilai PAD akan berdampak pada peningkatan kemakmuran pada penduduk suatu daerah. Hal ini disebabkan karena peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan PAD juga mampu mengoptimalkan aktivitas dan kinerja pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan berbagai sektor lainnya.

Dalam upaya meningkatkan PAD seperti yang disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk untuk lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana telah diataui dalam UU No. 33 tahun 2004 yaitu :

a. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Belanja Daerah

Dalam struktur APBD yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

disebutkan bahwa belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan suatu daerah. Kelompok belanja tidak langsung dapat dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi untuk perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produk atau jasa dari perusahaan tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah daerah atau

kelompok masyarakat atau perorangan yang sebelumnya telah ditetapkan secara spesifik peruntukannya.

e. Belanj Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi hasil

Belanj bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota dan sebaliknya, pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah daerah.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah yang telah ditentukan dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak diharapkan untuk tidak terulang, seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atau kelebihan dari penerimaan.

Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan suatu daerah. Kelompok belanja langsung terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung dimaksudkan untuk pengeluaran upah honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari kurun waktu 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari kurun waktu 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau program pemerintah daerah. Wujud dari belanja modal ini seperti jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB suatu wilayah secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah (provinsi, kabupaten/kota) dalam periode waktu tertentu (1 tahun atau triwulan). Sesuai dengan pengertian tersebut maka PDRB suatu wilayah menunjukkan ukuran atau skala perekonomian dari wilayah yang bersangkutan dalam periode tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, PDRB memiliki peran penting, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Untuk tahap perencanaan, PDRB antara lain dapat dimanfaatkan untuk mengamati kapasitas masing-masing sektor atau lapangan usaha. Sedangkan pada tahap pelaksanaan angka-angka PDRB antara lain dapat dimanfaatkan sebagai kontrol. Sementara dalam tahap evaluasi, PDRB dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai.

Berdasarkan sistem penilaian yang digunakan dalam melakukan perhitungan, pengklasifikasian transaksi ekonomi dan sistem penyajiannya, maka dari PDRB dapat diturunkan kepada berbagai ukuran lain yang secara keseluruhan lebih dikenal sebagai statistika pendapata regional.

Data yang terhimpun dalam statistik pendapata regional pada dasarnya merupakan indikator makro yang menunjukkan kondisi

perekonomian regional. Pemanfaatan data pendapatan regional diantaranya adalah :

1. Mengetahui Struktur Ekonomi

Setiap transaksi ekonomi yang dihitung dalam PDRB diklasifikasikan sesuai dengan sifat transaksinya. Pengklasifikasian dapat dilakukan berdasarkan sektor atau lapangan usaha atau dapat pula diklasifikasikan menurut penggunaannya. Dengan demikian PDRB akan tersusun dari sektor-sektor ekonomi yang memungkinkan dilakukan pengamatan terhadap struktur ekonomi.

2. Mengetahui Perkembangan Perekonomian

Dengan tersedianya data PDRB secara runtun waktu maka dapat dilakukan pengamatan terhadap perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu, baik pertumbuhannya maupun peranan sektoral. Pengamatan semacam ini antara lain dapat memberikan gambaran umum tentang arah perekonomian.

3. Mengetahui Perbandingan Perekonomian Antara Daerah

Dengan disusunnya PDRB dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil memungkinkan dilakukannya perbandingan antara daerah. Hal ini penting terutama untuk mengetahui posisi masing-masing daerah dalam wilayah perekonomian yang lebih luas.

c. Sistem Penilaian Yang Digunakan

Ada dua sistem penilaian yang digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pengertian dari masing-masing sistem penilaian tersebut adalah :

a. Atas Dasar Harga Berlaku

Adalah harga yang berlaku pada tahun perhitungan. Jadi PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada masing-masing tahun perhitungan.

b. Atas Dasar harga Konstan

Adalah harga pada tahun tertentu yang diperlukan sebagai tahun dasar. Karena menggunakan harga yang tetap, maka pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh perkembangan produksi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan.

Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan PDRB, yaitu :

4. Pendekatan Produksi

PDRB dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dikurangi bahan baku (input), ditambah pajak atas produk dikurangi subsidi atas produk.

a. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor neto

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah penjumlahan balas jasa faktor produksi berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini PDRB masih mengandung penyusutan dan pajak tak langsung neto.

5. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki arti penting sebagai proses peningkatan taraf hidup manusia serta pengembangan kegiatan perekonomian untuk mencapai suatu kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.

Dalam bukunya, Todaro (2011) mengemukakan arti pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketidakmerataan dan penghapusan atas kemiskinan. Dari pengertian tersebut terdapat tiga nilai inti untuk memaknai pembangunan, yaitu : pertama kecukupan yang memiliki arti sebagai kemampuan individu untuk mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kualitas hidupnya, kedua harga diri merupakan suatu perasaan individu menjadi manusia yang seutuhnya untuk mencapai sebuah kehormatan atau pengakuan, dan ketiga kebebasan dari sikap menghamba merupakan adanya kemampuan agar mencapai kebebasan dari kondisi kekurangan dan penghambaan social lainnya.

Sen (1998) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati. Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari konsumsi atas suatu komoditas saja namun juga manfaat atas komoditas tersebut.

Dalam masyarakat setidaknya terdapat tiga tujuan pembangunan yaitu : (1) peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan serta rasa aman, (2) peningkatan kualitas hidup yang tidak hanya meningkatnya pendapatan namun juga lapangan pekerjaan yang tersedia semakin luas, peningkatan kualitas pendidikan serta perhatian lebih terhadap nilai budaya dan kemanusiaan, (3) kemampuan untuk memilih status ekonomi

dan social bagi individu dan bangsa agar terlepas dari sikap bergantung serta menghamba yang menyebabkan kesengsaraan dan kebodohan.

Berikut beberapa teori mengenai pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh para tokoh :

a. Teori pembangunan Adam Smith

Sebagai bapak ekonomi Adam Smith menulis beberapa buku, salah satu bukunya yang terkenal berjudul "*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations (1776)*", beliau membahas mengenai pembangunan. Menurutnya proses pembangunan bersifat kumulatif dimana kemakmuran yang ditimbulkan dari kemajuan perekonomian hanya akan dinikmati oleh kaum kapitalis dan tuan tanah. Disisi lain kaum buruh akan tetap miskin. Namun hal ini akan berakhir ketika pemupukan modal berhenti, penduduk menjadi stasioner, upah berada pada tingkat yang kehidupan minimal pendapatan perkapita menurun dan perekonomian macet. Hal ini terjadi ketika adanya pasar bebas.

b. Teori Ricardo

Dalam bukunya yang berjudul "*The Principles of Political Economy and Taxation (1817)*", Ricardo membangun suatu teori bahwa suatu pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi, maka perlu adanya peningkatan produksi dan mengurangi konsumsi.

c. Teori Malthus mengenai perkembangan ekonomi

Penulis buku "*Principle of Political Economic* (1820)" yang sering dikaitkan dengan teori kependudukan dan teori pertumbuhan pada zamannya, mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi bukan hanya kelancaran ekonomi. Malthus menekankan pembangunan ekonomi dapat tercapai apabila dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tergantung pada jumlah komoditas yang dihasilkan oleh tenaga kerja

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu, angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Ketiga komponen tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Angka Harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah presentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pada proses perhitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga

Untuk perhitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum adalah 0. Hal

ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya keadaan ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

7. Kemiskinan

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan

lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu. Kemudian, karena biaya hidup di daerah kota dan desa berbeda-beda, demikian juga antara kelompok masyarakat didalamnya.

Disamping itu, pengertian kemiskinan lain yang dikembangkan oleh Sajogyo adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Berbeda dengan ukuran khas yang digunakan Indonesia sebagai tolak ukur kemiskinan. Untuk mengatur ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat umum, termasuk golongan yang tidak kaya, maka Pemerintah Indonesia sejak lama telah menentukan sembilan bahan pokok hidup yang senantiasa harus dijaga harganya. Jangan sampai membung tinggi hingga tidak mampu untuk dibeli oleh sebagian besar rakyat, walaupun jumlahnya dipasr bebas cukup banyak. Sembilan bahan pokok tersebut adalah : beras, gula, minyak goreng, minyak tanah, dan lainnya yang pasti diperlukan oleh setiap rumah tangga para penduduk kampung ataupun desa. Apabila ada rumah tangga tertentu yang terus menerus tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok hidup

tersebut neburut ukuran tertentu, maka rumah tangga tersebut dapat dikatakan miskin.

3. Ciri-ciri kemiskinan

Ada beberapa ciri kemiskinan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kemiskinan seseorang atau kelompok, yaitu :

1. Kemampuan memperoleh pendapatan sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena, pada umumnya mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan.
2. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, bahkan, tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Waktu mereka digunakan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup.
3. Pada umumnya mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh pun tidak mencukupi sebagai modal usaha. Dan mereka tidak dapat memenuhi persyaratan kredit perbankan, seperti jaminan kredit atau lainnya. Sehingga banyak dari masyarakat miskin yang berpaling kepada lintah darat dengan bunga yang sangat tinggi.

4. Akar penyebab kemiskinan.

Akar penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang diakibatkan karena jumlah sumber

daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang masih sangat rendah. Sedangkan kemiskinan buatan, yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada menjadikan anggota atau kelompok masyarakat tidak dapat menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas yang ada secara merata dan maksimal. Dengan demikian ada sebagian anggota masyarakat yang masih tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan dapat mengeluarkan seluruh anggota masyarakat dari garis kemiskinan.

Kemiskinan buatan dalam beberapa hal terjadi bukan disebabkan karena seorang individu atau suatu kelompok masyarakat malas bekerja ataupun karena mereka terus-menerus dalam keadaan sakit. Pada kalangan ilmuwan, kemiskinan buatan seringkali didefinisikan sebagai kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

B. Hubungan Antar Variabel

Pada bagian menjelaskan hubungan antar variabel independen (Belanja Daerah, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia) terhadap variabel dependen (Kemiskinan).

i. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa saja yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Whisnu, 2011) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara mamacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Mudrajat Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisonal lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten atau Kota.

Menurut Kuznet (dikutip dari Whisnu, 2011) pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur mulai berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

ii. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian yang dimiliki juga akan meningkat, sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Perusahaan akan memperoleh hasil yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang tinggi pula. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja juga akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil akan mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang

yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatana dan konsumsinya.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas bagaimana pengaruh belanja daerah, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan. Penelitian-penelitian ini dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dengan variabel yang berbeda.

1. Waseso Segoro dan Muhamad Akbar Pou. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Menganggurana Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009 – 2012”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB, Inflasi, IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009 – 2012. Sampel penelitian ini terdiri dari 33 Provinsi di Indonesia periode penelitian tahun 2009 – 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data PDRB, Inflasi, IPM, Pengangguran dan Kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat statistika dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Data tersebut diolah menggunakan metode analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik. Uji simultan (Uji F), uji parsial (uji t) dan koefisiensi determinasi dengan bantuan program SPSS22. Hasil dari

penelitian ini merupakan penelitian lanjutan berdasarkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang sangat menarik untuk dianalisis kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan PDRB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan nilai probabilitas PDRB $0.170 > 0.05$ H_0 diterima, dan inflasi dengan signifikan $0.975 > 0.05$ H_0 diterima. Sedangkan IPM memiliki tingkat signifikan sebesar 0.0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05 dan pengangguran memiliki tingkat signifikan sebesar 0.033 yang juga berarti kurang dari 0.05. Sehingga IPM dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan.

2. Sindi Paramita Sari “Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004 – 2013”.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi sumatera selatan periode 2004 – 2013. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berjenis time series sejak tahun 2004 hingga 2013 yang diperoleh dari website Bank Indonesia dan Badan Pusat statistik. Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sedangkan variabel independennya adalah pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari PDRB sebesar -1.001 dengan angka sig. sebesar 0.03. Untuk koefisien dari tingkat pendidikan sebesar -0.494 dengan angka sig. sebesar 0,024 yang berarti PDRB dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan untuk koefisien dari pengangguran adalah 0.086 dengan angka signifikan sebesar 0.029 yang artinya pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

3. Himawan Yudistira Ddoama, Agnes L Ch Lopian. Jacline I Sumual. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulagi Manado “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado”.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai tahun dasar. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan kota Manado. Penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan adalah dengan model analisis linear sederhana dengan menggunakan data PDRB dan tingkat kemiskinan di Kota Mnadao dari

publikasi Badan Pusat Statistika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado dengan koefisien dari PDRB sebesar -0.151 dan angka signifikan sebesar 0.014.

4. Agustina Mega Puspitasari putri. Fakultas Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2012”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi jawa Timur tahun 2008 – 2012. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan indeks pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita dan belanja publik sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari terbitan Badan Pusat Statistika berbagai edisi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan model common effect.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB per kapita terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Sedangkan Belanja publik berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Hasil tersebut disimpulkan berdasarkan hasil estimasi dengan model Common effect dimana IPM memiliki koefisien sebesar -1.002465 dengan angka sig. sebesar 0.0000, PDRB memiliki nilai koefisien sebesar -

0.448397 dengan angka sig, sebesar 0.0003 dan untuk belanja publik memiliki koefisien sebesar 0.118360 dengan angka sig. sebesar 0.0011.

5. Tito Cahya Pratama. Fakultas Ekonomi Universitas Jember “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, PDRB dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember 2000 – 2012”.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, PDRB dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember. Estimasi model dianalisis dengan menggunakan software SPSS. Hasil analisis SPSS menjelaskan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas t sebesar 0.236 yang artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Variabel pengangguran memiliki nilai probabilitas t sebesar 0.035, yang artinya pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk variabel PDRB dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Jember, dengan tingkat probabilitas masing-masing 0.830 dan 0.788.

6. Basyir, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur. Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengeluaran pemerintah Aceh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan merupakan data

sekunder yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistika (BPS) dan Bappeda Aceh. Data tersebut berbentuk pooling data yakni gabungan antara time series data selama periode 2009 – 2013 dengan cross section data yaitu 23 abupaten kota di Provinsi Aceh. Data dianalisis dengan metode ordinary least square (OLS). Penelitian menemukan bahwa secara simultan DAU, DAK dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di provinsi Aceh. Secara parsial hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

7. Muhammad Ilhamsyah Siregar, Iqbal Muwadi “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di daerah Aceh, karena ketergantungan daerah Aceh pada APBD. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah 23 kabupaten dan kota di Aceh dan menggunakan data tahun 2008 – 2011 yang bersumber dari publikasi Dinas Keuangan Aceh dan Badan Pusat Statistika (BPS). Model yang digunakan adalah regresi linier sederhana menggunakan data panel dengan metode analisis Fixed Effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi belanja daerah berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien determinan ($\text{Adj.R}^2 = 0,9646$), artinya 96,46 persen dipengaruhi oleh realisasi belanja daerah, jika realisasi belanja daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sedangkan realisasi belanja daerah berpengaruh negatif serta signifikan terhadap pengangguran dengan nilai $\text{Adj.R}^2 = 0,8400$ yang artinya realisasi belanja daerah 84 persen mempengaruhi pengangguran dan realisasi belanja daerah juga berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai $\text{Adj. R}^2 = 0,8598$ yaitu 85,98 persen kemiskinan dipengaruhi oleh realisasi belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah meningkat maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan.

D. Hipotesis

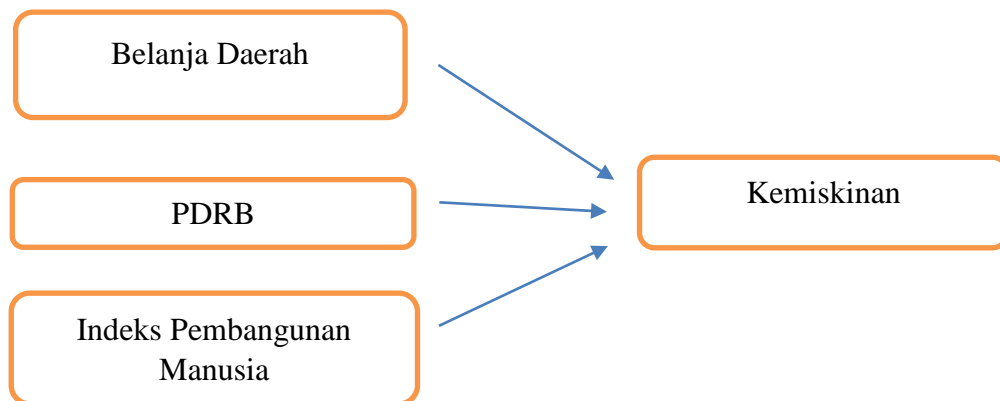
Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah, landasan teori dan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Belanja Daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Artinya, jika Belanja daerah meningkat, maka jumlah kemiskinan akan menurun
2. PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Artinya, jika jumlah PDRB meningkat, maka jumlah kemiskinan akan menurun.

3. Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan. Artinya, jika indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka jumlah kemiskinan akan menurun.

E. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan, maka model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Penelitian